

**POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KECAMATAN
TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA**

M. Ilham Anugrah

NomorStambuk : 1056 40094810



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KECAMATAN
TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

M. Ilham Anugrah

Nomor Stambuk: 105640094810

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana Alam Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten
Gowa

Nama Mahasiswa : M. Ilham Anugrah

Nomor Stambuk : 105640094810

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1184 / FSP / A. 1-VIII / VIII / 38 / 2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari sabtu tanggal 26 bulan agustus tahun 2017.

TIM PENILAI

Ketua, **Sekretaris,**

Ir. H. Saleh Molla, MM **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

Penguji:

1. **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** 
(.....)
2. **Dr. Jaelan Usman, M.Si** 
(.....)
3. **Drs. Anwar Parawangi, M.Si** 
(.....)
4. **Drs. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si** 
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ilham Anugrah

Nomor Stambuk : 105640094810

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 1 Januari 2017

Yang Menyatakan,

M. Ilham Anugrah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah selalu terpatri kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan berbagai macam rahmat, sehingga saya sempat menyelesaikan salah satu kewajiban saya selaku tokoh akademik dengan membuat sebuah karya penelitian yang berjudul **“pola komunikasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa”** diaalah pencipta dari segala apa yang ada dalam jagad raya ini. Salawat serta salam, yang selalu tercurahkan kepada eliau, Muhammad SAW, sebagai tokoh desainer dunia yang mampu melululantahkan peradaban kebiadaban hingga menata peradaban yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu membumikan ajaran-ajaran Tuhan yang sebaik mungkin.

Penulis menyadari dengan terselesaikannya skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu social ilmu politik universitas muhammaadiyah Makassar. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku ibunda Nurjannah dan ayahanda M. Yusuf, merekalah dua pejuang yang ooh dalam hidupku yang senantiasa memberikan arahan kepada saya dalam mengaruhi bahtera kehidupan hingga saya mampu menyelesaikan tugas akademik ini. Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Dr. Anwar Parewangi, M. Si selaku pembimbing I dan Rudi Hardi, S. Sos, M. Si selaku pembimbing II. Yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejaak pengusulan judul sampai pada penyelesaian skripsi ini.

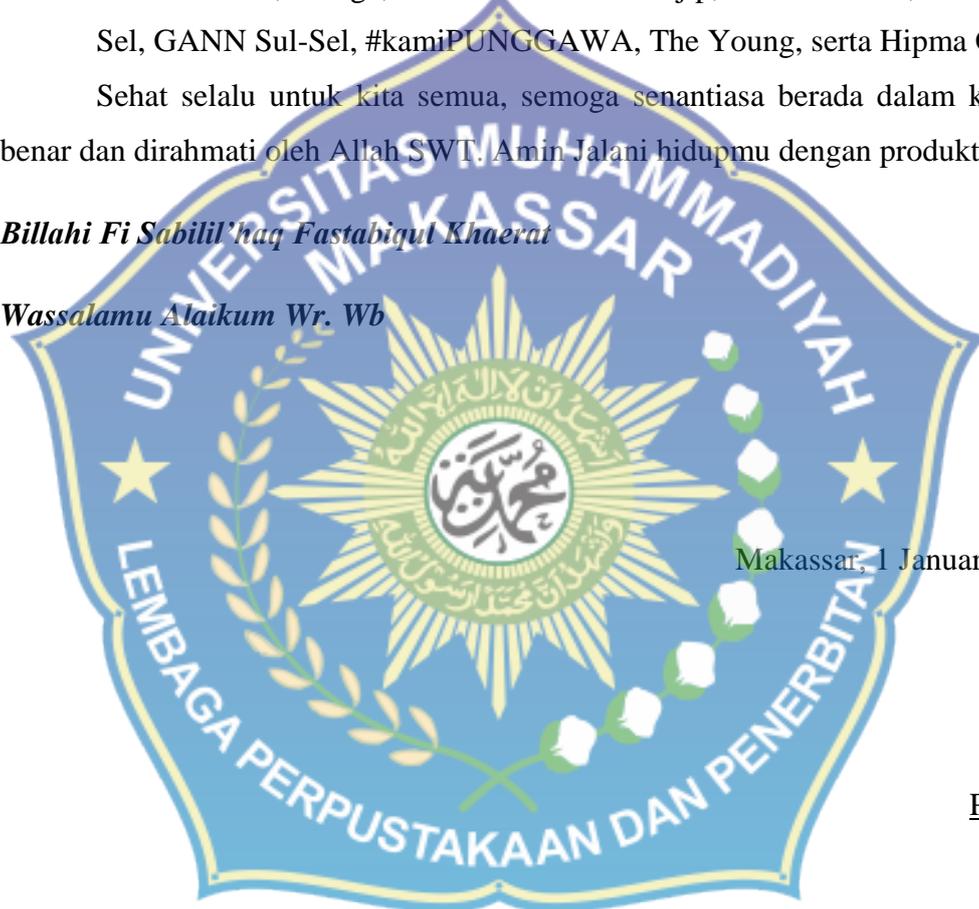
Tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Muhammad Idris, M. Si

3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto, S. Ip, M. Si
4. Dosen Fisipol beserta staf tata usaha Unismuh Makassar yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan yang dijalani.
5. Pihak pemerintah kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa beserta masyarakat setempat.
6. Teman-teman, kolega, serta sahabat di Himjip, BKD Sul-Sel, AMP Sul-Sel, GANN Sul-Sel, #kamiPUNGGAWA, The Young, serta Hipma Gowa. Sehat selalu untuk kita semua, semoga senantiasa berada dalam koridor benar dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin Jalani hidupmu dengan produktifitas

Billahi Fi Sabilil'haq Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Wr. Wb



Makassar, 1 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pola Komunikasi.....	7
B. Konsep Bencana Alam.....	15
C. Pola Komunikasi Pemerintah Daerah.....	26
D. Karangka Pikir.....	32
E. Defenisi Operasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Letak Geografi Kecamatan Tinggimoncong.....	39
B. Tugas Dan Fungsi.....	45
C. Struktur Organisasi Pemerintahan.....	48
D. Standar Operasional Prosedur.....	48
E. Visi Dan Misi.....	49
F. Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa.....	50
G. Faktor-faktor Yang Berpengaruhi Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA..... 67
LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara rawan gempa, dimana bencana tersebut harus dihadapi dalam setiap saat maupun dalam waktu tertentu. Oleh karena itu penanggulangan bencana harus ditangani secara integral, holistik dan komprehensif. Beberapa tahun terakhir ini intensitas bencana (seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, sering terjadi. Bencana tersebut tidak hanya menimpa wilayah Indonesia, tapi juga menimpa wilayah belahan bumi lainnya. Di Indonesia sebagaimana diketahui bahwa titik-titik rawan gempa/bencana (antara lain di daerah Aceh, Yogyakarta, Padang, Bengkulu, dan Papua), merupakan daerah titik rawan gempa. Selain disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam, juga oleh faktor manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam; seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor, dan lain-lain, sementara yang disebabkan oleh faktor manusia adalah seperti konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Mengatasi permasalahan bencana tersebut, berbagai pihak telah terlibat dalam persoalan tersebut, namun peran vital Negara tidak dapat dinafikan, dalam hal ini Pemerintah harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Selain karena bencana (baik yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam, maupun oleh faktor manusia), kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, serta sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan warga negara. Akibat dari peristiwa tersebut dampak dari bencana

juga bersifat kompleks sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Letak geografis dan kondisi geologis menyebabkan Indonesia menjadi salah satu Negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut di atas dikarenakan keadaan geologi Indonesia sangat unik, terletak diantara dua lempeng benua yang selalu bergerak.

Bencana tidak hanya mengakibatkan korban jiwa tetapi juga dapat menghancurkan sarana, prasarana, pemukiman, tekanan psikologis yang hebat baik bagi korban langsung masyarakat pada umumnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan social ekonomi masyarakat, seperti dapat melumpuhkan segala sumber daya sehingga menghambat program dan kegiatan pembangunan dan pemerintah. Khususnya korban bencana alam, seharusnya telah ada mekanisme untuk menangani korban bencana alam yang menjadi kebutuhan fundamental bagi penduduk Indonesia. Mengingat secara geografis wilayah Indonesia terletak pada lintasan pacific ring of fire, yakni kawasan rawan gempa dengan adanya gunung-gunung berapi dan pergerakan patahan tektonik yang aktif menyikapi keberadaan korban bencana alam tersebut, dijelaskan bahwa perlu mekanisme yang berfungsi untuk melindungi mereka khususnya pada masa tanggap darurat. Minimal perlindungan tersebut mampu meredam guncangan-guncangan social ekonomi yang mungkin muncul sehingga kelompok-kelompok yang sudah ditandai dengan karakteristik kerawanan tersebut tidak semakin jauh terjatuh dalam keterpurukan. Bencana merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia yang datang tanpa

diduga. Bencana selalu menimbulkan dampak buruk bagi manusia yang menjadi korban. Memahami bencana menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat tanggap dan mengetahui langkah yang harus dilakukan saat bencana datang. Menurut *International Strategy for Disaster Reduction–United Nations* (Paripurno, 2008, h. 9) bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Beberapa bencana alam yang sering melanda Indonesia antara lain gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Mengingat Indonesia masuk ke dalam daerah rawan bencana, maka pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan bencana berupa undang-undang hingga beberapa peraturan terkait bencana. Proses tanggap darurat pada banyak peristiwa bencana alam di Indonesia dalam prakteknya tidak berjalan dengan segera dan terkesan lambat. Koordinasi dari pemerintah kepada masyarakat kacau balau. *Miscommunication* yang berlangsung mendatangkan persoalan baru, seperti konflik, ketidakpercayaan publik, bahkan adu fisik antar pihak-pihak yang terlibat.

Metode bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada, sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan

risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana (Paripurno, 2008, h. 33). Untuk Kabupaten Gowa yang letak geografisnya termasuk dalam dataran tinggi yang terkenal dengan objek wisata alam yang bagus di tumbuh dengan pepohonan serta perubahan iklim yang semakin tak menentu menjadikan daerah ini sering longsor . Hampir setiap sering terjadi longsor, Kab. Gowasing terjadi longsor terutama di daerah yang dulu dikenal sebagai hutan lindung kini, sudah menjadi wilayah pemukiman, terutama oleh petani lading yang berpindah-pindah

Bencana longsor dapat menimbulkan korban jiwa, membawa kerugian material yang besar, menghancurkan hasil-hasil pembangunan. Sebesar apapun skalanya, kerugian dan dampak negatif bencana dapat diredam dan dikurangi. Dahulu bencana banjir dipandang sebagai kejadian tak terhindarkan yang berada di luar jangkauan manusia, sehingga penanganan bencana banjir pun lebih dititikberatkan pada upaya tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bencana banjir dilihat sebagai interaksi antara ancaman bahaya dengan kerentanan masyarakat dan kurangnya kapasitas untuk menangkalnya. Penanggulangan bencana banjir saat ini lebih diarahkan pada bagaimana mengelola resiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Pada saat tanggap darurat sering terjadi kebutuhan para korban bencana alam tidak dapat terdistribusi dengan baik. Ketika terjadi bencana jalur akses berbagai informasi mengenai bencana sering sulit untuk diperoleh. Hal ini juga menjadi salah satu kelemahan dalam proses penanganan bencana di Indonesia.

Metode komunikasi bencana melibatkan perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan dan koordinasi antar pihak pemerintah, lembaga berwenang, masyarakat, LSM, donatur dan relawan dalam metode komunikasi bencana sangat dibutuhkan guna membangun suatu komunikasi bencana yang dapat dipahami makna pesannya sehingga menghasilkan umpan balik yang diharapkan berdasarkan tujuan pesan yang disampaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut dengan judul “ *Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola komunikasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pola komunikasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa?

C. Tujuan penelitian

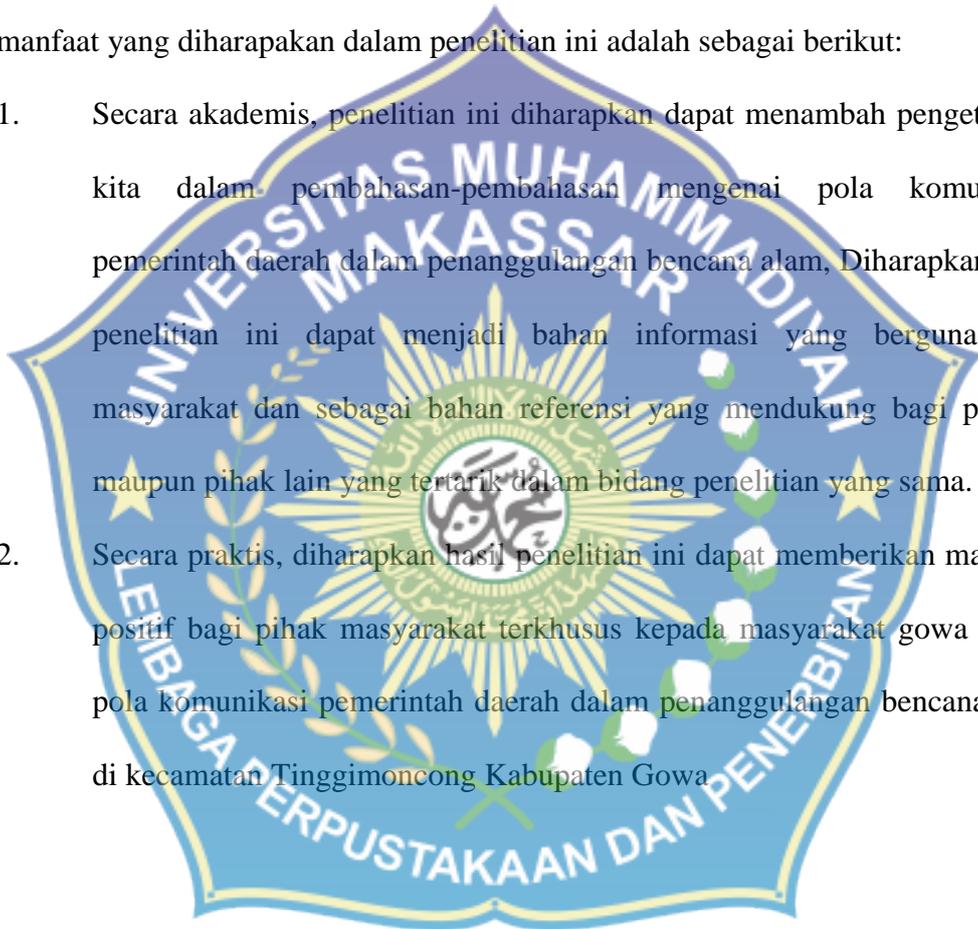
1. Untuk mengetahui pola komunikasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di kecamatan kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pola komunikasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa

D. Manfaat penelitian

Sebagaimana penjelasan tujuan penelitian maka dapat kita menarik manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita dalam pembahasan-pembahasan mengenai pola komunikasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak masyarakat terkhusus kepada masyarakat gowa dalam pola komunikasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep pola komunikasi

1. Pengertian komunikasi

Pengertian Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004). Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai arah hubungan yang berlainan (Soenarto, 2006). Tubbs dan Moss mengatakan bahwa pola komunikasi atau hubungan itu dapat diciptakan oleh komplementaris atau simetri. Dalam hubungan komplementer, satu bentuk perilaku akan diikuti oleh lawannya. Contohnya perilaku dominan dari satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan. Dominasi bertemu dengan dominasi, atau kepatuhan dengan kepatuhan (Tubbs dan Moss, 2001). Disini kita mulai melibatkan bagaimana proses interaksi menciptakan struktur system. Bagaimana orang merespon satu sama lain menentukan jenis hubungan yang mereka miliki.

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin communicat(us) yang berkaitan erat dengan kata communicare yang berarti make common yang juga berkaitan erat dengan dengan kata community. Jadi, komunikasi bisa terjadi jika kegiatan itu bertolak dari kondisi tertentu. Kegiatan

komunikasi itu ditandai dengan adanya hubungan/interaksi antar pihak yang bersangkutan.

Definisi komunikasi pada perkembangan saat ini, berbeda dengan definisi komunikasi pada masa lalu. Sejak lama definisi komunikasi dititikberatkan pada proses keyakinan atau usaha untuk merubah tingkah laku orang lain. Namun Communication Theory Today (mulai 1995) memberikan definisi yang berbeda mengenai komunikasi. Yang pertama, memberi penekanan pada proses penyampaian berita berdasarkan teori Lasswell tentang komunikasi : 'who says what in which channel to whom with what effect'. Sedangkan yang kedua, memberi penekanan pada proses pertukaran nilai atau proses pertukaran pikiran. Kemudian menurut Littlejohn pentingnya suatu komunikasi adalah : 'sesuatu yang sehari-hari terlihat biasa, berubah menjadi teka-teki besar bagi seseorang begitu ia bermaksud mencari makna/pengertian yang tersembunyi di dalam sesuatu itu. Jadi, komunikasi bertujuan untuk mencari makna.

Dari definisi di atas, komunikasi memang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita dalam rangka mencari makna. Hal tersebut tak terkecuali dalam bidang pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, memang memungkinkan bagi hadirnya sistem-sistem lainnya. Dalam hal ini terbentuk hubungan pemerintahan dan komunikasi antara pemerintahan dengan yang diperintah. Inilah yang kemudian disebut dengan Komunikasi Pemerintahan.

Komunikasi pemerintahan kemudian membentuk hibrida-hibrida baru, antara lain seperti, komunikasi antar manusia, komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi organisasional, yang kemudian menjadi konstruksi

komunikasi pemerintahan. Khusus bagi ilmu pemerintahan, komunikasi politik digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi setiap sistem politik. Alat yang dapat digunakan oleh aktor-aktor politik dalam berkomunikasi dan meyakinkan publik adalah simbol-simbol, bahasa, dan opini publik dengan kepentingan sebagai muatannya (pesan/messages), melalui advokasi, propaganda, iklan provokasi, dan retorika.

Hakikat komunikasi politik sebenarnya kembali kepada hakikat manusia yang selalu ingin mengembangkan jalinan komunikasi dengan manusia lain yang berada dalam determinan geo natur dan geo kultur yang berbeda. Hal ini mengandung makna bahwa komunikasi politik harus mampu menembus ragam kepentingan, ragam pola keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya kepentingan bersama tanpa ada satu negarapun yang merasa dirugikan. Kemudian sumber komunikasi politik itu memang berasal dari individu, karena individu-individu memiliki ide-ide yang sangat berharga. Ataupun dapat bersumber pada elit politik serta dapat pula berasal dari suatu faham, ideologi, pola keyakinan, seperangkat norma, kitab suci atau dari dokumen-dokumen yang tersimpan dan terpelihara dan lain-lain. Namun pada akhirnya, sumber-sumber tersebut, pada keberhasilannya proses komunikasi bermuara pada kemampuan komunikator di dalam memotivasi komunikan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. (Nugroho 2011). Istilah komunikasi

dipergunakan untuk menunjukkan tiga bidang studi yang berbeda: proses komunikasi, pesan yang dikomunikasikan, dan studi mengenai proses komunikasi. Komunikasi termasuk ke dalam ilmu sosial yang meliputi *intrapersonal communication, interpersonal communication, group communication, mass communication, intercultural communication*, dan sebagainya. (Nugroho : 2011)

Menurut Littlejohn (1982: 12) “in a broad sense the term model can apply to any symbolic representation of a thing, process, or idea” (dalam pengertian luas pengertian model menunjukkan setiap representasi simbolis dari suatu benda, proses atau gagasan/ide). Pada level konseptual model mempresentasikan ide-ide dan proses. Dengan demikian model bisa berbentuk gambar-gambar grafis, verbal atau matematika. Biasanya model dipandang sebagai analogi dari beberapa fenomena. Perbedaan teori dan model menurut Littlejohn dan Hawes (1983) adalah teori merupakan penjelasan (*explanation*), sedangkan model hanya merupakan representasi (*representation*). Dengan demikian, model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa komunikasi. Melalui model komunikasi bisa dilihat faktor-faktor yang terlibat dalam proses komunikasi. Akan tetapi, model tidak berisikan penjelasan mengenai hubungan dan interaksi antara faktor-faktor dan unsur-unsur yang menjadi bagian dari model. (Nugroho: 2011)

Menurut Deutsh (1966), model dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, mempunyai empat (4) fungsi. Pertama, fungsi mengorganisasikan. Artinya, model membantu kita mengorganisasikan sesuatu hal dengan cara mengurut-ngurutkan serta mengaitkan satu bagian/sistem dengan bagian sistem lainnya, sehingga kita

memperoleh gambaran yang menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Kedua, model membantu menjelaskan. Meskipun model pada dasarnya tidak berisikan penjelasan, namun model membantu kita dalam menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian informasi yang sederhana. Tanpa model, informasi tentang suatu hal akan tampak rumit atau tidak jelas. Ketiga, fungsi “heuristik”. Artinya melalui model, kita akan dapat mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan. Karena, model membantu kita dengan memberikan gambaran tentang komponen-komponen pokok dari sebuah proses atau sistem. Keempat, fungsi prediksi. Melalui model, kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam dunia ilmiah model ini sangat penting, karena dapat dipergunakan sebagai dasar bagi para peneliti dalam merumuskan hipotesis, yakni pernyataan-pernyataan yang berisikan penjelasan mengenai kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antara satu faktor dengan faktor lainnya. (Nugroho: 2011)

Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In which Channel To Whom With What Effect?* (Nugroho:2011)

1. *Who*; Siapa, yaitu individu, kelompok atau organisasi yang bertindak sebagai komunikator atau penyampai pesan.
2. *Say What*; Mengatakan apa, yaitu pesan yang disampaikan individu, kelompok, atau organisasi.
3. *In Which Channel*; Dengan saluran apa, merupakan media apa yang digunakan dalam proses komunikasi.

4. *To Whom*; Kepada siapa, yaitu objek atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi.
5. *With What Effect*; Yaitu respon, yang menyangkut perilaku atau sikap individu, masyarakat setelah menerima pesan.

Model ini mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Unsur sumber (*Who*) merangsang pertanyaan mengenai pengendalian pesan, sedangkan unsur pesan (*Says What*) merupakan bahan untuk analisis isi pesan. Saluran komunikasi (*In Which Channel*) dikaji dalam analisis media. Unsur penerima (*To Whom*) diaitkan dengan analisis khalayak, sementara unsur pengaru (*With What Effect*) jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi massa pada khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. (Nugroho: 2011)

Paradigma Laswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni: (Nugroho: 2011)

1. Komunikator (*Communicator, Source, Sender*), pengirim pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.
2. Pesan (*Message*), merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator.
3. Media (*Channel, Media*), saluran komunikasi atau tempatBerlaluinya pesan dari komunikator kepada komunikan
4. Komunikan (*Communicant, Communicatee, Receiver, Recipient*), seseorang atau sejumlah orang yang menerima pesan.

5. Efek (*Effect, Impact, Influence*), efek di sini bisa berupa tanggapan dari komunikan apabila pesan tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator.

Jadi berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. (Nugroho: 2011)

2. Tujuan komunikasi

Secara umum, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut

1. Supaya yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Agar dapat dimengerti oleh komunikan maka komunikator perlu menjelaskan pesan utama dengan sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin.
2. Agar dapat memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu yang lain dengan kemampuan mendengar apa yang dibicarakan orang lain.
3. Agar pendapat kita diterima orang lain. Komunikasi dan pendekatan persuasif merupakan cara agar gagasan kita diterima oleh orang lain.
4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Komunikasi dan pendekatan persuasif kita mampu membangun persamaan persepsi dengan orang kemudian menggerakkannya sesuai keinginan kita.

Fungsi Komunikasi Dalam manfaat dan dampak yang ditimbulkan komunikasi memiliki fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, fungsi komunikasi adalah sebagai berikut.

1. Sebagai Kendali : Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi.
2. Sebagai Motivasi : Komunikasi memberikan perkembangan dalam memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal dalam kehidupan kita.
3. Sebagai Pengungkapan Emosional : Komunikasi memiliki peranan dalam mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang, gembira, kecewa, tidak suka, dan lain-lainnya.
4. Sebagai Informasi : Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenai dan menilai pemilihan alternatif.

Syarat-Syarat Komunikasi Dalam berkomunikasi diperlukan syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya. Syarat-syarat komunikasi adalah sebagai berikut.

1. Source (sumber) : Source adalah dasar dalam penyampaian pesan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber komunikasi adalah orang, lembaga, buku dan lain-lain.
2. Komunikator : komunikator adalah pelaku penyampain pesan yang berupa individu yang sedang berbicara atau penulis, dapat juga

berupa kelompok orang, organisasi komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, dan sebagainya.

3. Pesan : pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan mempunyai tema utama sebagai pengarah dalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku orang lain.
4. Saluran (channel) : Saluran adalah komunikator yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Saluran komunikasi berupa saluran formal (resmi) dan saluran informal (tidak resmi). Saluran formal adalah saluran yang mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dan bawahannya, sedangkan saluran informal adalah saluran yang berupa desas-desus, kabar burung dan kabar angin.
5. Komunikan : komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi yang berupa individu, kelompok dan massa
6. Effect (hasil) : efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi dengan bentuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku komunikan. Perubahan itu bisa sesuai keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan komunikator.

B. Konsep Bencana Alam

1. Pengertian bencana

Banyak pengertian atau definisi tentang “bencana” yang pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur social, kerusakan pada

aspek system pemerintahan, bangunan, dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana. (Nurjannah dkk: 2013). Peristiwa atau rangkaian peristiwa sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa peristiwa bisa bersifat tunggal (peristiwa/fenomena alam) dalam waktu hampir bersamaan. contoh peristiwa adalah gempa tektonik. Apabila gempa tektonik tersebut diikuti tsunami, hal ini disebut rangkaian peristiwa. Atau banjir misalnya. Ketika banjir sudah surut/selesai dan kita mulai membersihkan kotoran/sampah didalam rumah atau di halaman rumah yang terkena banjir, tiba-tiba banjir datang lagi. ini juga dapat disebut rangkaian peristiwa. Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR sebagaimana disebutkan diatas, digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut “bencana” harus dipenuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut : (Nurjannah dkk: 2013).

- a. Ada peristiwa
- b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia
- c. Terjadi secara tiba-tiba (sudden) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan- lahan/bertahap (slow)
- d. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian social-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain
- e. Berada diluar negeri kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Untuk membedakan antara “bencana” dan “bukan bencana” dapat diberikan contoh “letusan gunung merapi” yang terjadi ditengah laut. Apakah letusan Gunung api tersebut dapat disebut bencana ? Marilah kita uraikan apakah

memenuhi unsur-unsur atau criteria sebagaimana dikemukakan diatas.Pertama ,letusan gunung api tersebut merupakan “peristiwa”. Kedua, terjadinya letusan gunung api adalah faktor alam (fenomena alam). Ketiga, letusan gunung api terjadi secara perlahan-lahan (ada proses peristiwa). Keempat,letusan gunung api terjadi ditengah laut (yang jauh dari pemukiman penduduk). Hal tersebut diyakini tidak menimbulkan korban jiwa manusia atau kerusakan/kerugian harta benda.Kelima, tidak ada unsure “diluar kemampuan manusia untuk menanggapi” karena kejadian di tengah laut sedangkan penduduk berada jauh dari lokasi kejadian. (Nurjannah dkk: 2013)

Setelah diurai, ternyata letusan gunung api tersebut tidak memenuhi unsur dampak korban jiwa manusia maupun kerusakan/kerugian. Juga tidak diperlukan kemampuan masyarakat untuk menanggapi.Dengan demikian letusan gunung api di tengah laut yang dimaksud adalah bukan bencana melainkan hanya fenomena alam biasa. (Nurjannah dkk: 2013)

a. Resiko bencana

Dalam manajemen bencana, resiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada.Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat gtetap karena bagian dari dinamika prose salami pembangunan atau pembentukan roman muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal.Sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat. (Nurjannah dkk: 2013). Dalam kaitan ini, bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana baik alam maupun buatan disuatu tempat.Kerentanan menunjukkan

kerawanan yang dapat dihadapi suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman. Ketidakmampuan merupakan kelangkaan upaya atau kegiatan untuk mengurangi korban jiwa atau kerusakan. Dengan demikian semakin tinggi bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan, akan semakin besar pula resiko bencana yang akan dihadapi. Berdasarkan potensi ancaman bencana dan tingkat kerentanan yang ada, maka dapat diperkirakan resiko bencana yang akan terjadi di wilayah Indonesia tergolong tinggi. Resiko bencana pada wilayah Indonesia yang tinggi tersebut disebabkan oleh potensi bencana yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut yang memang sudah tinggi pula. Sementara faktor lain yang mendorong semakin tingginya resiko bencana adalah menyangkut pilihan masyarakat (public choice). (Nurjannah dkk: 2013)

b. Bahaya Bencana (hazard)

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, Kerugian harta benda yang merusak lingkungan. Bumi tempat tinggal secara alami mengalami perubahan secara dinamis untuk mencapai suatu keseimbangan. Akibat proses-proses dari dalam bumi dan dari luar bumi, bumi membangun dirinya yang ditunjukkan dengan pergerakan kulit bumi, pembentukan gunung api, pengangkatan daerah dataran menjadi pegunungan yang merupakan bagian dari proses internal. Sedangkan proses eksternal yang berupa hujan, angin, serta fenomena iklim lainnya cenderung melakukan perusakan morfologi melalui proses degradasi (pelapukan bantuan, erosi dan abrasi). Proses alam tersebut berjalan secara terus-menerus dan mengikuti suatu pola tertentu yang oleh para ahli ilmu kebumih

dapat diterangkan dengan lebih jelas sehingga dapat dipetakan. Proses perubahan secara dinamis dari bumi ini dipandang sebagai potensi ancaman bahaya bagi manusia yang tinggal di atasnya. (Nurjannah dkk: 2013).

Sebagai ilustrasi, proses salami pembangunan bumi akibat tenaga asal dalam bumi tercermin sebagai gempa bumi (akibat pergeseran, tumbukan penunjaman lempeng tektonik serta aktivitas magmatik), letusan Gunung api akibat aktivitas pergerakan magma dari dalam bumi pada kondisi tekanan tinggi meneroboskan kulit bumi. Proses perusakan morfologi akibat tenaga asal luar bumi (eksternal) tercermin dari degradasi perbukitan akibat erosi oleh air hujan yang pada kondisi ekstrim menyebabkan tanah longsor dan banjir. Pemanasan oleh sinar matahari menyebabkan dinamika di atmosfer bumi. Akibat faktor perubahan lingkungan serta gejala meteorologi dan geofisika lainnya dapat menimbulkan kondisi anomaly cuaca yang terkadang ekstrim (badai, banjir atau kekeringan) (Nurjannah dkk: 2013)

c. Faktor-faktor Penyebab Bencana

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yakni (1) faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan dari manusia, (2) Faktor non-alam (non-natural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan (3) faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). (Nurjannah dkk: 2013)

Menurut UNDRO (1992) ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kerentanan adalah (1) berada dilokasi berbahaya, (2) kemiskinan, (3) perpindahan penduduk dari desa ke kota, (4) kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, (5) bertambahnya penduduk yang besar, (6) perubahan budaya, dan (7) kurangnya informasi dan kesadaran. (Nurjannah dkk: 2013). Menurut Eko Teguh Paripurno (Ed). Sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan kedalam empat sumber ancaman,yaitu : (Nurjannah dkk: 2013)

1. Sumber ancaman klimatogis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak dipantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lainnya.
2. Sumber ancaman geologis, yaitu sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi.
3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan, atau dapat pula akibat proses persiapan produksi.
4. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumberdaya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya sumber ancaman

2. Longsor

a. Pengertian Tanah Longsor

Tanah longsor atau dalam bahasa Inggris disebut Landslide, adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.

b. Jenis-jenis Tanah Longsor

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

1. Longsoran Translasi

Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai

2. Longsoran Rotasi

Longsoran rotasi adalah bergerak-nya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung.

3. Pergerakan Blok

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu.

4. Runtuhan Batu Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah.
5. Rayapan Tanah Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah.
6. Aliran Bahan Rombakan Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak.

c. Gejala Umum Tanah Longsor

Gejala-gejala umum yang biasanya timbul sebelum terjadinya bencana tanah longsor adalah : Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing.

1. Biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba.

2. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

d. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tanah Longsor

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.

1. Hujan

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan.

Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor, karena melalui tanah yang merakah air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah.

2. Lereng terjal

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.

3. Tanah yang kurang padat dan tebal

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.

4. Batuan yang kurang kuat

Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.

5. Jenis tata lahan

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi

longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.

6. Getaran

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.

7. Susut muka air danau atau bendungan

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk 220 mudah terjadi longsor dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan.

8. Adanya beban tambahan

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah.

9. Pengikisan/erosi

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal.

10. Adanya material timbunan pada tebing

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah.

11. Bekas longsoran lama

Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sesudah terjadi patahan kulit bumi.

C. Pola Komunikasi Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Secara historis, asal usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan Latin Kuno. *Koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di Yunani sampai sekarang. *Municipality* (kota atau kota madya) dan varian-variannya berasal dari istilah hukum Romawi *manucipium*. *City* (kota besar) berasal dari istilah Romawi

civitas, yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk). *Country* (kabupaten) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang pejabat kerajaan.

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu Negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara (*intermediate unit*) seperti provinsi dan unit dasar (*basic unit*) seperti kota besar (*city*), kotamadya (*municipality*), atau kabupaten (*country atau regency*) dan di beberapa Negara, berupa subkota (*submunicipal*).

Di Indonesia sendiri pemerintah pusat mengadakan alat-alat perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah, karena mengingat negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki daerah yang sangat luas, namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya.

Pemerintahan daerah sebagai kiblat urusan publik baik segala sector, harus memperhatikan problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat baik secara SDA maupun secara SDM. Sebuah wilayah dalam yang berpotensi mengalami sebuah bencana sangat mempengaruhi nilai perkembangan wilayah tersebut olehnya itu peran pemerintah daerah dalam membentuk sebuah antisipasi-antisipasi problem demikian sangat di perlukan, maka dari itu kerja-kerja taktis dalam menangani permasalahan bencana harus menjalar hingga ke ruang-ruang masyarakat. Pola komunikasi pemerintah dalam menpublis persoalan

bencana Longsor yang sering menimpa kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa sangat di perlukan.

Pola komunikasi pemerintahan daerah harus bersifat responsive hingga pola yang di maksud dapat berjalan dengan maksimal. Teori peluru merupakan konsep awal efek komunikasi massa yang oleh para teoritis komunikasi tahun 1970-an dinamakan pula *Hypodermic needle Theory* yang di terjemahkan sebagai “*Teori jarum Hypodermic*” ada tiga elemen utama dari teori ini yaitu 1 pesan (Stimulus), 2. Seorang penerima Receiver (Organisme), 3 efek (Respon) dengan demikian, jika di lihat sitematikanya, maka teori ini di kenal paling sederhana, yaitu efek merupakan reaksi individu terhadap stimuli tertentu seperti bagan berikut ini.

Model Stimulus-Respo (S-R)

Single Message ——— Individual Reseiver ——— Reaction

Single message (s) adalah stimulus yang diberikan atau di pacarkan oleh media massa tertentu, kemudian stimulus tersebut diterima oleh individu penerima (*Individual Receivar atau Organisme*). Dan akhirnya, individu menerima stimulus memberikan reaksi (*Reaction atau Respon*) terhadap stimulus tersebut.

Dengan kata lain, teori S-R menjelaskan bahwa media menyajikan stimuli perkasa yang secara seragam di perhatikan oleh massa. Stimuli ini membangkitkan, atau proses yang lain yang hampir tidak terkontrol oleh individu. Setiap anggota massa memeberikan respon yang sama pada stimuli yang dating

dari media massa (Parawangi, 2003:29) teori ini mengasumsikan bahwa massa tidak berdaya ditembaki oleh media massa. Karena teori S-R teori SR di sebut juga teori peluru (*Bullet Teory*). Dan merupakan teori klasik mengenai proses terjadinya efek mesia massa yang sangat berpengaruh.

1. Komunikasi Pemerintahan

Bagi komunikasi pemerintahan, terdapat bagian-bagian dari komunikasi politik yang dapat digunakan dalam mengkonstruksi komunikasi pemerintahan, yaitu, komunikasi pemerintahan harus mampu mengidentifikasi pesan/muatan dan alat-alat atau cara-cara yang sejajar dengan alat-alat yang digunakan oleh aktor-aktor politik, yang efektif untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Pesan/muatan adalah fakta-fakta yang dapat menunjukkan penepatan variasi janji, pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemerintah, dan pemikulan resiko tindakan yang diambil berdasarkan pilihan bebas menurut hati nuraninya. Oleh karenanya, proses pemerintahan dijalankan melalui hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. (Surya Arya 2011)

Selanjutnya, dalam kajian komunikasi politik, sikap perilaku penguasa merupakan pokok bahasan atau objek kajian utama, karena sikap perilaku penguasa merupakan warna dominan dan tolak ukur untuk menentukan dalam sistem politik apa proses komunikasi itu berlangsung. Sikap penguasa memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesa komunikasi baik yang berada dalam struktur formal maupun yang berkembang dalam masyarakat. Terutama bagaimana sikap terhadap 'pendapat umum' atau perlakuan

terhadap hak-hak berkomunikasi penghuni sistem apakah mendapat tempat utama atau sebaliknya bahwa pendapat umum dan hak-hak berkomunikasi berada dalam ruang gerak terbatas dan kaku. Oleh karenanya, komunikasi politik akan sangat efektif terjadi di negara-negara penganut sistem demokrasi, atau sistem terbuka. Seperti salah satu contohnya, di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah di jelaskan di atas, bahwa proses pemerintahan mengatur hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. Pertama-tama, kita sepakati bersama, bahwa yang memerintah di sini menunjuk kepada pihak pemerintah atau elit penguasa/pemerintah. Kemudian, yang diperintah menunjuk kepada rakyat sebagai pihak yang bergantung kepada pemerintah. Kemudian proses komunikasi di antara keduanya lazim disebut dengan komunikasi pemerintahan.

Taliziduhu Ndraha dalam kybernologi , mendefinisikan komunikasi pemerintahan merupakan proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan frame of reference pihak yang lain pada posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap yang lain terbentuk, berubah, atau terpelihara, berdasarkan kesaling pengertian dan saling kepercayaan antara kedua belah pihak. (Surya Arya: 2011).

Dalam hal proses pemerintahan, faktor rakyat adalah faktor yang tidak bisa kita kesampingkan. Sebuah negara ada karena adanya rakyat, begitupun dengan adanya tujuan negara, adanya tujuan negara merupakan kristalisasi dari tujuan setiap individu rakyat. Oleh karenanya, komunikasi pemerintahan menjadi sesuatu yang penting. Komunikasi antar manusia, sebagai salah satu pembentuk konstruksi

komunikasi pemerintahan, dimaksudkan sebagai jalan untuk memahami interaksi antar manusia. Kemudian, dalam hubungan itu, komunikasi dijadikan sebagai alat untuk mengontrol human behaviour. Jadi jika seseorang hendak mencari dan menemukan makna suatu perilaku dan nilai aspirasi manusia, dalam hal ini rakyat (yang diperintah), ia harus berkomunikasi dengan rakyat tersebut. (Surya Arya: 2011)

Namun dewasa ini, di Indonesia, proses komunikasi pemerintahan seakan tersendat. Rakyat seakan sudah hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Begitupun pemerintah yang seakan tidak tanggap terhadap segala suara rakyat. Masalah ini bisa kita lihat dalam contoh kasus pembuatan kebijakan publik. Terlalu banyak kebijakan pemerintah yang memang tidak pro rakyat, bahkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Padahal dalam hal pencapaian tujuan negara, terdapat tujuan rakyat tiap individu. Para anggota dewan dan pemerintahan kita seolah hanya bisa mengobral janji kepada rakyat. Memberi harapan begitu besar saat kampanye, tapi toh kemudian ketika mereka telah mendapat jabatan, janji tinggal janji, kesengsaraan rakyat semakin menjadi. Inilah kemudian yang menjadi sorotan semua pihak, termasuk di dalamnya para akademisi, pakar politik, pemerintah gagal berkomunikasi dengan baik dengan rakyat. Artinya komunikasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan rakyat banyak. (Surya Arya: 2011)

D. Kerangka Pikir

Pola komunikasi pemerintah daerah dan timsar dalam tanggap bencana di kecamatan sombaopu kabupaten gowa adalah bagaimana konsep dan social terhadap tanggap bencana yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam melaksanakan pola komunikasi antara pemerintah daerah dan timsar, tidak berjalan semudah yang dibayangkan, akan selalu ada faktor penghambat dan pendukung yang menyertai pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan timsar. Dan ketika factor pendukung lebih banyak daripada factor penghambatnya maka pelaksanaan pengawasan akan lebih cepat dan bgitupun sebaliknya. Ketika pola komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah berdampak baik bagi masyarakat yang akan memberikan tanggap bencana yang cukup baik dan tentunya baik untuk kesehatan masyarakat

BAGAN KERANGKA PIKIR



E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pola komunikasi adalah proses interaksi yang didalamnya terdapat ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh seseorang kepada yang lainnya.
2. Konsep dalam hal ini adalah Pola komunikasi dalam tanggap darurat sebagai acuan untuk melaksanakan tanggap darurat di kecamatan manggala kota Makassar
3. Factor-faktor yang mempengaruhi dalam pola komunikasi pemerintah daerah dengan timsar di kecamatan sombaopu kabupaten gowa
4. Komunikator (*Communicator, Source, Sender*), pengirim pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.
5. Pesan (*Message*), merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator.
6. Media (*Channel, Media*), saluran komunikasi atau tempat Berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan
7. Komunikan (*Communicant, Communicatee, Receiver, Recipient*), seseorang atau sejumlah orang yang menerima pesan.
8. Bencana alam adalah sebuah proses kejadian alam yang secara sistematis tanpa ada campur tangan manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa Topik yang diteliti sekitar tentang Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Dalam upaya aktualisasi data dan informasi serta realisasi kebijakan dapat dilihat di beberapa kabupaten/kota terutama dapat terungkap di daerah yang dijadikan sampel dinilai representatif terhadap daerah lain di Kabupaten Gowa, yang berlangsung dari bulan November sampai dengan Desember 2015.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas penulis yang menyangkut mengenai pola komunikasi pemerintah daerah dan timsar dalam tanggap bencana di kecamatan manggala kota makassar, kiranya lebih menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selain, pemilihan dan penggunaan desain ini terkait dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan dengan menghimpun kemudian menganalisis berbagai fakta dan data terkait sejauh mana pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan timsar.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode wawancara dan observasi lapangan dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pejabat struktural dan. Adapun tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang

diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan.

C. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan, adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari informan penelitian berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa staf.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah dimana penulis mengambil data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di

D. Informan Penelitian

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan informan penelitian diambil dari serta aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan
Pemerintah	1 Orang
Masyarakat	3 Orang
Timsar	3 Orang
Jumlah	7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di.

2. Wawancara (Interview) Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan kajian terhadap bahan-bahan tertulis yang menjadi dokumen dan yang tersimpan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memuat aspek yaitu:

1. Analisis sebelum lapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah daerah terhadap pencemaran udara.

2. Analisis selama di lapangan dengan menggunakan model miles and huberman (Sugiono, 2012:246) bahwa terdapat beberapa komponen tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

3. Pengumpulan data yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum kelapangan menganalisis data hasil tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan

data setelah dilapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.

4. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh dilapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.
5. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
6. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Kredibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan tehnik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari

sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan waktu pada waktu yang berbeda yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografi Kantor Kecamatan Tinggimoncong

Letaka geografi kecamatan tinggimoncong kabupaten Gowa. Kabupaten/kota luas wilayah kecamatan tinggimoncong 142.87 Km² batas wilayah kecamatan Tinggimoncong.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tombolo Pao
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Parigi
4. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Parigi

Jumlah penduduk kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa 22.361 Orang. Jumlah kartu keluarga (KK) 5.176 KK, laki-laki berjumlah 11.104 Orang, perempuan 11.257 Orang. Jumlah agama yang ada di kecamatan Tinggimoncong, kabupaten Gowa: Islam (22.257 Orang), Khatolik (58 Orang), Protestan (129 Orang). Jumlah Pendidikan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Tidak tamat sekolah (2.531 Orang), tamat SD dan SLTP (2.173 Orang), tamat dan sederajat (795 Orang).

Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu kecamatan yang tergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa, yang merupakan penyangga utama Kota Makassar adalah salah satu daerah yang istimewa dibanding dengan daerah lainnya. Industri hortikultura, industri perkebunan dan industri agrowisata sudah merambah ke daerah ini, khusus di daerah Malino, Ibukota Kecamatan Tinggimoncong adalah primadona perpariwisataan di

Selawesi Selatan. Daerah yang berada diatas ketinggian 1.500 DPL, ini juga pemasok utama tanaman hortikultura ke Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan hasil dari perkebunan ini sebahagian sudah di ekspor kebeberapa negara di Asia dan Eropa.

Malino adalah kawasan wisata terindah yang berada di Kabupaten Gowa. Perjalanan dari kota Makassar menuju daerah ini memakan waktu sekitar 2 jam. Dengan nuansa pegunungan yang indah, hawa udara yang sejuk, barisan pohon pinus yang rindang, dan penduduk yang ramah, menjadikannya kota kecil yang senantiasa ramai dikunjungi masyarakat makassar ataupun wisatawan asing, utamanya pada hari-hari libur. Wisata air terjun seribu tangga, Air Terjun Takapala, Kebun Teh Nittoh, Lembah Biru dan Gunung Bawakaraeng menjadi ciri khas dari kota Malino. Oleh-oleh khas daerah ini adalah buah Markisa, dodol ketan, Tenteng Malino, apel, wajik, yang memiliki rasa yang khas. Malino juga menjadi daerah penghasil beras bagi wilayah Sulawesi Selatan.

Berbagai jenis tanaman tropis yang indah, tumbuh dan berkembang di kota yang dingin ini. Selain itu, Malino pun menghasilkan buah-buahan dan sayuran khas yang tumbuh di lereng gunung Bawakaraeng.

Kesemuanya ini baik langsung maupun tidak langsung menambah pendapatan penduduk, sehingga penduduk akan sejahtera, disamping itu perpindahan penduduk ke daerah ini meningkat dari tahun ke tahun, tapi dibalik itu semua kita juga perlu menyadari akan dampak negatif yang timbul sebagai efek dari geliat ekonomi di daerah ini.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah mengetahui mengenai tentang kesesuaian lahan, jenis tanaman atau komoditas tanaman, manajemen pertanaman, aspek ekonomi dan sosial, serta infrastruktur kawasan Pertanian di Kecamatan Tinggimoncong.

Kegunaan laporan ini adalah memberikan informasi mengenai potensi sebagai lahan pertanian hortikultura serta bentuk desain dan tata ruang pertanian di kecamatan Tinggimoncong. Berdasarkan gambaran pada peta, jenis tanah pada kecamatan Tinggimoncong adalah inceptisol dimana jenis tanah ini merupakan tanah cukup subur dan sesuai untuk pertanaman hortikultura. Hal ini sesuai dengan pendapat Ritung (2007) bahwa kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi.

Besarnya potensi yang dimiliki Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Gowa, mendorong Pemprov Sulsel melalui Dinas Pertanian akan menjadikan daerah itu, sentra pengembangan berbagai jenis tanaman hortikultura, khususnya sayur-sayuran. prospek pengembangan kawasan Malino sangat menjanjikan, baik dibidang pariwisata maupun pertanian. Daerah yang terletak 1500 di atas permukaan air laut itu merupakan daerah yang juga kini mengembangkan kentang. Jadi selain dikenal sebagai tujuan ekowisata, juga dikenal sebagai sentra pengembangan tanaman hortikultura (Anonim, 2011).

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson bahwa di kecamatan Tinggimoncong memiliki jumlah rata – rata bulan basah 9 (>100mm) dan rata – rata bulan kering 3(<65mm) termasuk dalam tipe iklim C. Kecamatan Tinggimoncong memiliki curah hujan tertinggi pada bulan Desember, Januari, Februari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September (Djaya, 2011).

Tinggimoncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. Sayuran yang paling banyak dibudidayakan adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan Mamuju (Anonim, 2011).

Selain itu, pada umumnya Kecamatan Tinggimoncong juga dapat ditanami berbagai macam jenis sayuran baik itu pada bulan kering dan bulan basah. Pada bulan basah daerah ini cocok untuk ditanami kubis, gambas, seledri, selada, kentang, asparagus, brokoli, wortel, tomat, cabai, carica, bit, sawi, kailan, petsai. Sedangkan untuk bulan kering cocok untuk ditanami bawang putih, dan daun bawang (Djaya, 2011). Produk sayuran Indonesia sering diekspor ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, namun terkadang mendapat penolakan karena setelah sampelnya diuji di laboratorium ternyata residu pestisidanya melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Hal ini terjadi karena penyemprotan pestisida yang berlebihan pada saat pertanaman sehingga pada saat panen, produk sayuran yang dihasilkan tidak memenuhi syarat kualitas yang ditentukan oleh

negara tetangga tersebut. Sayuran merupakan jenis tanaman yang rentan terhadap bahaya residu pestisida yang berlebihan karena sifat pertanamannya yang hanya semusim, tidak tahunan seperti buah-buahan misalnya (Herdiani, 2011).

Salah satu cara untuk mencegah berulangnya kejadian tersebut adalah dengan menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) Sayuran atau Pedoman Budidaya Sayuran yang Baik. GAP adalah pedoman umum dalam melaksanakan budidaya yang benar untuk menjamin kualitas produk dan keamanan petani maupun konsumen serta ramah lingkungan. Tujuan diterapkannya GAP adalah untuk meningkatkan daya saing produk sayuran Indonesia di pasar domestik dan internasional yang ditunjukkan oleh peningkatan pangsa ekspor dan atau penurunan impor, tentunya dengan meningkatkan mutu produk sayuran kita.

Ruang lingkup GAP sayuran meliputi : (1) Manajemen Usaha Produksi, (2) Lahan dan Media Tanam, (3) Benih, (4) Penanaman, (5) Pemeliharaan, (6) Pemupukan, (7) Perlindungan Tanaman, (8) Irigasi/Fertigasi, (9) Panen, (10) Pasca Panen, (11) Penanganan Limbah, (12) Kesehatan, Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja dan (13) Kepedulian Lingkungan.

1. Manajemen usaha produksi meliputi : pencatatan dan dokumentasi, evaluasi internal, penanganan kemampuan pelaku usaha dan penanganan keluhan.
2. Lahan dan media tanam meliputi : lokasi lahan usaha dan persiapan lahan dan media tanam.
3. Aspek benih meliputi mutu benih dan perlakuan benih yang tidak memiliki titik kendali yang wajib, melainkan semuanya sangat

dianjurkan, meskipun demikian aspek ini sangat menentukan kualitas mutu sayuran yang dihasilkan oleh petani, dan karenanya juga sangat menentukan pendapatan usaha taninya.

4. Penanaman hanya memiliki titik kendali anjuran dan sangat dianjurkan, begitu pula aspek pemeliharaan yang menyarankan petani untuk melaksanakannya sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) sebagai panduan budidaya.
5. Pemupukan meliputi rekomendasi jenis, jumlah dan waktu pemupukan kemudian aplikasi pemupukan (organik dan anorganik) serta penyimpanan pupuk.
6. Perlindungan tanaman meliputi : prinsip perlindungan tanaman, pestisida, penggunaan pestisida, pemeliharaan alat perlindungan, penyimpanan pestisida serta pembuangan sisa pestisida dan bekas kemasan.
7. Aspek irigasi/fertigasi memiliki titik kendali anjuran dan sangat dianjurkan, sedangkan aspek panen hanya memiliki titik kendali sangat dianjurkan.
8. Aspek selanjutnya adalah pasca panen yang memiliki satu titik kendali wajib yaitu penggunaan bahan kimia untuk penanganan pasca panen harus aman sesuai dengan tujuan dan prinsip keamanan pangan

9. Penanganan limbah dan sampah hanya memiliki titik kendali sangat dianjurkan, namun harus tetap diperhatikan agar limbah dan sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.
10. Aspek kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja memiliki satu titik kendali wajib yaitu : pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan produksi dan penanganan hasil dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit menular sehingga diharapkan produk sayuran yang dihasilkan aman dikonsumsi.
11. Aspek terakhir adalah kepedulian lingkungan yang hanya memiliki titik kendali berupa anjuran berupa kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat usaha baik berupa sumber daya alam dan masyarakat sekitar maupun keaneka ragaman hayati.

B. Tugas Dan Fungsi

A. Camat

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

B. Sekretaris Umum

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja dilingkup kecamatan.

C. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, dan mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan kecamatan.

D. Subbagian Keuangan Dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban, dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan.

E. Seksi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan dan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintahan, pembinaan administrasi kelurahan, pembinaan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS), serta penegakkan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perundang-undangan.

F. Seksi Perekonomian Dan Pembangunan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan serta penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan

pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan.

G. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, penanggulangan masalah sosial, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, dan peran wanita.

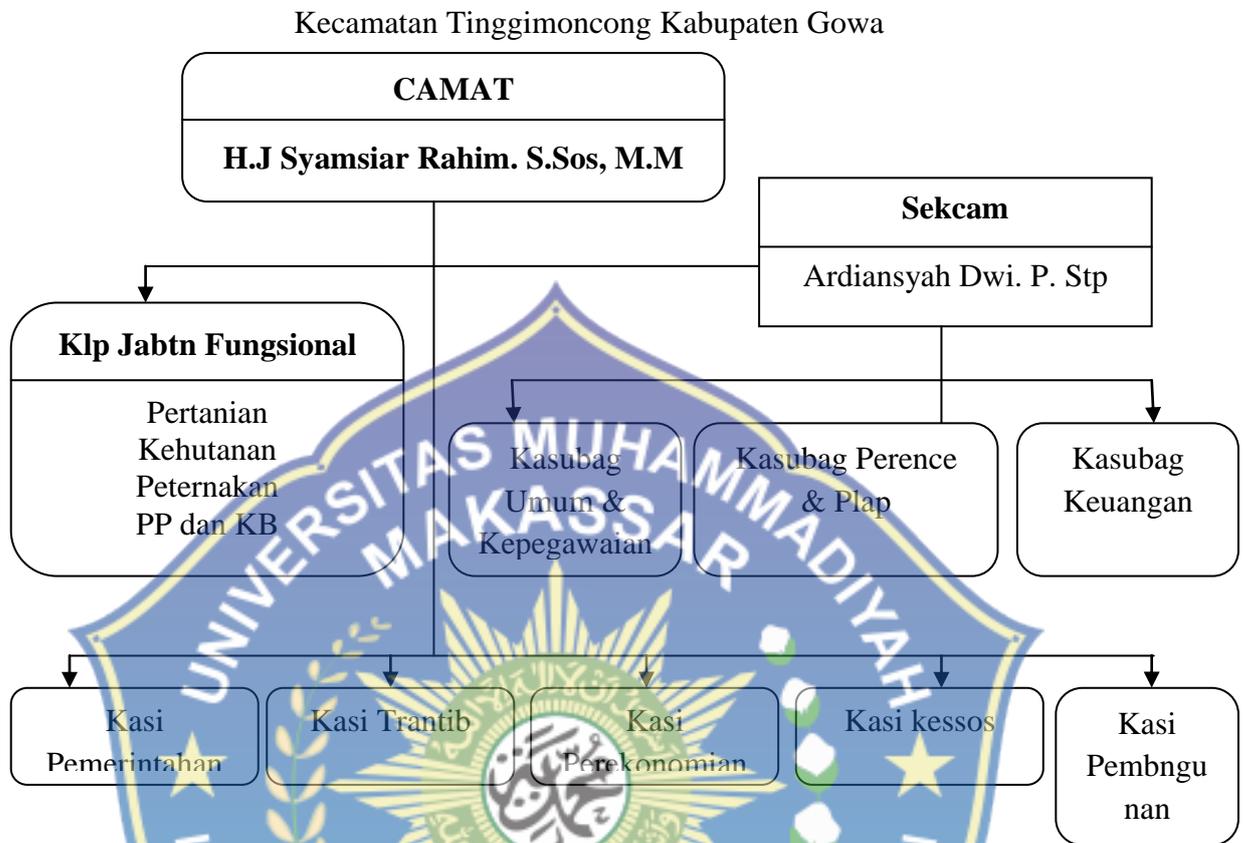
H. Seksi Pengelolaan Kebersihan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja dan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan.

I. Lurah

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan sebagian yang dilimpahkan oleh walikota dibidang pemerintahan, perkonomian, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom wilayah kerja.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan



D. Standar Operasional Prusedur

1. Pembuatan Akta Jual Beli/Akta Hibah/APBH (Akta Pembagian Hak Bersama)
2. Keterangan Kelahiran
3. Surat Pernyataan Waris
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Surat Pindah
7. Dispensasi Nikah
8. Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal

9. Surat Keterangan Domisili Usaha
10. Syarat Izin Mendirikan Bangunan (Membangun Baru, Menambah, Renovasi, Dan Pemutihan)
11. Surat Keterangan Tidak Mampu
12. Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal (Bagi Yang Akan Berangkat Haji)
13. Izin Pemanfaatan Ruang

E. Visi Dana Misi

A. Visi

Terwujudnya Kecamatan Tinggimoncong Lebih Tertib Dalam Program Dan Menjadi Andalan Di Kabupaten Gowa Sebagai Daerah Kunjungan Wisata

B. Misi

1. Meningkatkan system dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi wilayah
4. Mewujudkan sebagai daerah kunjungan wisata
5. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan adat istiadat sebagai akar budaya lokal

F. Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa?

1. Komunikator

Komunikator seseorang yang melakukan pemberitahuan, pemberian bagian (dalam sesuatu), pertukaran, dimana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. (Daryanto, 2010:63). Komunikator dapat dianggap proses penciptaan suatu kesamaan atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim dan penerima (Shimp, 2003:163). Kunci utama dari definisi ini adalah diperlukan kesamaan pikiran yang dikembangkan antara pengirim dan penerima jika terjadi komunikasi. Kesamaan pemikiran ini membutuhkan adanya hubungan saling berbagi (sharing) antara pengirim (seperti pengiklan) dengan penerima (konsumen).

Mencermati pada definisi komunikasi tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam komunikasi terkandung unsur-unsur pemberi pesan/sumber, isi pesan, proses pemberitahuan, penerima pesan dan umpan balik. Secara iengkapnya, semua aktifitas komunikasi melibatkan delapan elemen berikut : Sumber, Penerjemah, Pesan, Saluran, Penerima, Interpretasi, Gangguan dan Umpan balik. Sumber atau source adalah orang atau kelompok orang, misalnya sebuah perusahaan, yang memiliki pemikiran (ide, rencana pelayanan, dan lain-lain) untuk disampaikan kepada orang atau kelompok orang lain. Dari sumber ini kemudian ada penerjemah (encoding) pesan untuk mencapai pemikiran ke dalam bentuk- bentuk simbolis. Untuk memahami hal demikian secara serius dalam pelaksanaannya untuk menanggulangi persoalan bencana alam yang terjadi di

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa maka berikut hasil wawancara dengan masyarakat bagaimana pemerintah Kabupaten gowa dalam memahami hal ini.

“seperti pertanyaan saudara bahwa sejauh ini pemerintah kecamatan Tinggimoncong belum maksimal melakukan komunikator terhadap masyarakat akan hal ini mengenai persoalan bencana alaam sehingga masyarakat acuh tak acuh dalam menjaga lingkungannya (Wawancara, LM 7 Maret 2016)”

Hal senada juga dipertanyakan terhadap Timsar mengenai pertanyaan ini yaitu bagaimana kesiapan pemerintah Kecamatan sebagai komunikator dalam menyampaikan komunikasinya untuk permasalahan bencana alam berikut hasil wawancaranya sebagai berikut.

Sebagaimana dua hasil wawancara diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa belum maksimal melakukan komunikasi terhadap masyarakat hal demikian dinilai bahwa kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa melakukan hal tersebut hanya disaat kondisi musim hujan sehingga masyarakat yang berpemukiman diwilayah tersebut disaat kondisi kemarau dengan mudah membuang sampah disembarang tempat. Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong melakukan hal ini belum maksimal adanya. Belum ada aksi lanjutan sebagai bentuk kampanye terhadap masyarakat akan perlunya menjaga ekosistem alam yang diarea lereng pemukiman untuk menghindari bencana alam berupa longsor.

2. Pesan

Pesan merupakan proses penyampaian informasi seseorang yang dimana sesuai dengan arahan yang kita perintahkan kepada masyarakat, terkait hal

demikian pesan informasi mengenai hal bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa merupakan hal substansi dalam hal ini sebagai upaya untuk mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya untuk menjaga lingkungan alam sekitar. Pesan pada dasarnya tidak hanya menginformasikan berbagai manfaat informasi, akan tetapi juga melihat siapa yang menyampaikan atau terlibat dalam informasi tersebut. Informasi tidak hanya menyampaikan apa yang menjadi manfaat bagi suatu berita tetapi juga melihat siapa yang menyampaikan perintah tersebut. Pesan bencana alam ini termasuk ke dalam publisitas positif karena menggunakan perangkat pemerintah di dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang manfaat menjaga alam untuk terhindar dari bencana alam berupa longsor.

Menurut hasil pengamatan penulis, jika dikaitkan dengan pengaplikasian teori atribusi pada penelitian tersebut, maka dijelaskan bahwa atribusi yang mendorong penyampaian isi pesan memiliki tingkah laku perangkat pemerintahan adalah atribusi penyebab situasional, yaitu dipengaruhi oleh lingkungannya dan adanya perasaan menyukai sesuatu, dalam hal ini adalah situasi bencana alam merupakan hal yang sangat ditakuti masyarakat agar sadar akan pentingnya untuk menjaga lingkungan meran oleh nya itu perlu memahami dan menyadari tersebut secara kritis. Untuk memaksimalkan masalah pesanana ini dalam pola komunikasi sejauh mana efektifitasnya maka berikut hasil wawancara dengan masyarakat mengenai hal ini.

“sesuai dengan pertanyaan saudara sejauh ini pesan yang disampaikan pemerintah dalam persoalan ini belum jeelas, bahkan pemerintah melakukan hal ini sangat langkah tentang pemberitahuan. (Wawancara, MI 11 Maret 2016)”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat kita menarik sebuah benang merah untuk masalah ini bahwa ternyata pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dalam melakukan hal ini belum melaksanakan hal tersebut secara maksimal karena mereka hanya menempuh jalur penyampaian informasi bencana ala mini melalui pendekatan persuasif terhadap masyarakat tanpa ada sebuah terobosan baru berupa adanya rapat bersama yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dengan masyarakat setempat dalam melaksanakan hal ini secara serius dan militan.

3. Media

Media dalam prespektif soial merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses menyampaikan informasi. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap penerima informasi. Menurut Oemar Hamalik media informasi adalah Alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara komunikator dan komunikan dalam proses penyampaian informasi untuk kegiatan tertentu. Menurut Suprpto dkk, menyatakan bahwa media informasi adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh komunikator untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam paradigma informasi tradisional, proses komunikasi mengajar biasanya berlangsung di dalam wilayah dengan kehadiran komunikator di suatu wilayah dan pengaturan jadwal yang kaku di mana proses komunikasi mengajar hanya bisa berlaku pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Peran komunikator sangat dominan.

Dalam paradigma sekarang, dengan pendekatan komunikasi dominasi komunikator berkurang dan sebagian besar hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Sebagai fasilitator komunikator semestinya dapat memfasilitasi komunikasi agar dapat belajar setiap saat di mana saja dan kapan saja komunikasi merasa memerlukan. Proses komunikatif akan berjalan efektif dan efisien bila didukung dengan tersedianya media yang menunjang. Penyediaan media serta metodologi informasi yang dinamis, kondusif serta dialogis sangat diperlukan bagi pengembangan potensi informasi, secara optimal. Hal ini disebabkan karena potensi informasi akan lebih terangsang bila dibantu dengan sejumlah media atau sarana dan prasarana yang mendukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Media dalam perspektif komunikasi merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses komunikasi. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap komunikasi. Dengan keterbatasan yang dimiliki, manusia seringkali kurang mampu menangkap dan menanggapi hal-hal yang bersifat abstrak atau yang belum pernah terekam dalam ingatannya. Untuk menjembatani proses internalisasi komunikasi yang demikian, diperlukan media informasi yang memperjelas dan mempermudah komunikasi dalam menangkap pesan-pesan perintah/peringatan yang disampaikan. Oleh karena itu, semakin banyak peserta didik disuguhkan dengan berbagai media dan sarana prasarana yang mendukung, maka semakin besar kemungkinan nilai-nilai komunikasi mampu diserap dan dicernya. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat mengenai media yang

digunakan pemerintah dalam menyampaikan informasi ini.

“sesuai dengan pertanyaan ananda bahwa sejauh ini yang saya lihat pemerintah belum lihai dan tidak menggunakan media dalam menyampaikan masalah ini, hanya melalui bicara dari rumah kerumah. (Wawancara, UK 15 Maret 2016)”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan kedua hasil wawancara diatas untuk memperjelas masalah ini, bahwa ternyata sejauh ini pemerintah belum mampu menjalankan hal ini dengan baik, dalam hal ini pemerintah belum melakukan penyampaian informasi ini dengan menggunakan media apapun. Hanya menemput metode pendekatan dari rumah ke rumah warga secara personal sehingga hal tersebut dinilai belum efektif dan maksimal pemerintah melakukan hal ini.

4. Komunikasikan

Komunikasikan adalah partner atau rekan dari komunikator dalam komunikasi. Label peran sebagai penerima berita. Komunikasikan lah yang akan menerjemahkan pesan tersebut sesuai dengan pemahamannya (dekodifikasi). Kemampuan menangkap pesan sangat bergantung pada tingkat intelektualitasnya, latar belakang budaya, situasi dan kondisinya. Dalam Model Komunikasi S-O-R, singkatan dari Stimulus Organisme Response ini semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, tidaklah mengherankan karena objek material dari psikologi dan komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen. sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Effendy, 2003:254). Untuk memahami hal ini secara cermat maka berikut hasil wawancara dengan masyarakat terkait penilaiannya.

“sejauh ini terkait masalah itu, belum dilaksanakan disebabkan

sampai hari ini pemerintah kecamatan tinggimoncong kabupaten Gowa belum hadir melaksanakan proses komunikasi terhadap kami. (Wawancara, AS 18 Maret 2016)”

Sebagaimana diuraikan kedua informan diatas terkait peran pemerintah selaku komunikator dalam penyelenggaraan komunikasi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana alam. Menurut informan bahwa sampai pada kondisi hari ini pemerintah belum hadir secara kasat mata dalam memberikan informasi maupun peringatan-peringatan dalam bentuk apapun terkait dengan permasalahan tersebut. Anggapan masyarakat pada hari ini menganggap bahwa pemerintahan kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa masih terlalu sibuk menyelesaikan hal-hal urgen seputar pemerintahan. Sehingga mengurus hal-hal seperti ini dianggap sepele untuk dikesampingkan. Peran pemerintah seharusnya memposisikan dirinya terhadap kondisi masyarakat sebagai control social bukan hanya hadir sebagai pemenuhan aspek kebutuhan masyarakat dari bidang administrasi saja. Tetapi jauh pemerintah harus hadir untuk melihat kondisi social khususnya dalam daerah-daerah yang memiliki kondisi alam yang memberikan kerawanan terhadap perkembangan hidup masyarakatnya.

5. Efek

Persoalan komunikasi efek komunikasi menjadi sesuatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Semua pengaruh komunikasi yang dilakukan terencana mempunyai tujuan, yakni mempengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau efek dalam komunikasi merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Dalam pernyataan tersebut terlihat bahwa efek mempunyai tujuan yang

mempengaruhi komunikasi setelah atau sebelum penerima pesan. Pengaruh tersebut bias mencakup banyak hal, tergantung dari komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan.

Komunikasi bersifat efektif apabila pesan tersebut menimbulkan efek, efek tersebut berupa perhatian yang selanjutnya menjadi berupa tata kelakuan atau tingkah laku sesuai dengan pesan yang disampingkan. Pengaruh dapat dikatakan mengenai jika perubahan yang terjadi pada penerima sama dengan tujuan yang diinginkan oleh komunikator. Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikasinya. Efek komunikasi dapat kita bedakan atas efek kognitif, konatif. Untuk memahami lebih dalam efek komunikasi yang terjadi terkait peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa.

Berikut wawancara dengan pihak kecamatan terkait efek komunikasi yang selama ini dilakukan, sekretaris kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa.

“persoalan efek komunikasi mengenai pemberitahuan kewaspadaan masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana alam. Sejauh ini kami sudah menempuh berbagai macam hal untuk memberikan komunikasi terhadap masyarakat baik secara persuasive maupun secara media cetak. Dan saya melihat sejauh ini masyarakat sangat antusias dan merepon persoalan itu. Ditandai dengan minimnya masyarakat melakukan aktivitas penebangan kayu. (Wawancara, SM 18 Maret 2016)”

Sebagaimana hasil wawancara informant diatas bahwa sejauh ini pemerintahan kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa telah melaksanakan semaksimal mungkin komunikasi tersebut, mereka juga menganggap bahwa efek komunikasi sangat perlu ditingkatkan kembali karena hal demikian menyangkut

kehidupan social masyarakat kec.tinggimoncong kab.Gowa.adapun efek negative yang timbul ditengah masyarakat terkait dengan komunikasi penanggulangan bencana alam itu disebabkan lahirnya beberapa persepsi yang timbul akibat ketidak pahaman masyarakat dari pentingnya menjaga dan merawat lingkungan setempat.selain itu hal yang dapat timbul disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan masyarakat kec.tinggimoncong kab.Gowa dalam peran lingkungan terhadap kehidupan mereka.

Effek komunikasi merupakan sesuatu yang harus diperjelas ditengah persepsi masyarakat dalam menyangkap pesan komunikasi yang disampaikan karena apabila hal ini dibiarkan tanpa ada preses pengulangan komunikasi dapat menimbulkan permasalahan persepsi pesan yang diterima.olehnya itu kehadiran pemerintah kec.tinggimoncong kab.Gowa sangat perlu dilakukan secara berulang ulang agar masyarakat dapat menerima pesan komunikasi penanggulangan bencana secara serius dan diperhatikan dengan jelas.adapun hal tersebut perlu dijaga oleh pemerintah dalam menyampaikan pesan itu dapat melalui secara persuasive dengan metode pemberitahuan maupun melalui media cetak dengan cara membuat baliho maupun papan papan larangan beraktifitas di area rawan bencana alam tersebut sekaligus memberikan pernyataan semaksimal mungkin terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

G. Faktor-faktor Apa Yang Berpengaruh Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa?

1. Kerja Sama

Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu factor penghambat proses komunikasi dalam penanggulangan bencana alam. kerjasama akan terjadi ketika dua orang merealisasikan diri dalam mencapai tujuan bersama. menurut Winardi (Annas, 2017: Hal.31).kegiatan tidak saling mempercayai serta tidak memahami nilai partisipasi antara masyarakat menjadi unsure mendasar didalam kerja sama yang dipraktekkan.sihinggah kerja sama menjadi kategori dasar gagalnya sebuah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kerja sama dalam proses komunikasi telah menjadi pengaruh penting untuk menciptakan sebuah hubungan yang efektif di antara serangkaian pelaku komunikasi.pelaku komunikasi melaksanakan kerja sama dalam sejumlah besar komunikasi didalam ruang lingkup social,terdapat adanya sebuah tendensi untuk bekerja sama didalam sebuah proses komunikasi.kerja sama memiliki aspek yang banyak membantu memperbesar produktifitas komunikasi.kita perlu senantiasa mengingat bahwa kerja sama merupakan suatu sifat yang perfasif dari komunikasi antara pelaku komunikasi. seringkali kita melupakan hal tersebut sewaktu kita memperbincangkan masalah masalah yang timbul karena ulah pelaku komunikasi itu sendiri. Untuk memahami factor penghambat yang hadir dengan adanya komunikasi penanggulangan bencana alam kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa berikut.

Wawancara dengan masyarakat kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa terkait dengan factor yang timbul disaat komunikasi.

“sejauh ini yang saya lihat bahwa factor penghambatnya mengenai persoalan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. (Wawancara, IL 21 Maret 2016)”

Dari hasil wawancara informant diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata salah satu factor yang menimbulkan gagalnya komunikasi penanggulangan bencana alam adalah kerjasama. Kurangnya proses kerjasama yang efektif menjadi indikasi awal terjadinya sebuah mis komunikasi.kurangnya kerja sama dan semangat antara makasyarakat dan pemerintah memberikan dampak yang negative terhadap komunikasi bencana alam.jika hal demikian tdk dapat dihidupkan maka setiap proses komunikasi yang sifatnya bersinambungan tidak akan tercapai tujuan komunikasi tersebut.menurut Winardi (Annas,2017:32).kerja sama dalam komunikasi adalah tindakan yang saling menghidupkan baik bagi pelaku maupun proses komunikasi tersebut.kerja sama yang senangtiasa memiliki sifat untu tidak terciptanya sebuah kegagalan komunikasi dalam sebuah proses komunikasi telah terjadi dalam hubungan pemerintah dan masyarakat.

Proses saling mengharapkan atau melimpahkan tanggung jawab secara tidak wajar kepada pihak lain telah menjadi hubungan komunikasi yang sifatnya ketergantungan dan saling mengharapkan satu sama lain.selain itu kegagalan kerja sama dapat memberikan efek negative terhadap kualitas komunikasi.peran pemerintah dalam menjalankan proses komunikasi yang terjadi di kec.tinggimoncong kab.Gowa ditemukan saling adanya proses yang tidak integritasi antara masyarakat dan pemerintah setempat.

2. Pendidikan

Pendidikan suatu elemen yang sangat diperlukan setiap pelaku yang terlibat dalam komunikasi agar komunikasi tersebut dapat berjalan dan mencapai tujuan sebagai mana yang ditetapkan. pendidikan bukan hanya sekedar membantu maupun melaksanakan tugas yang akan implementasikan, tetapi pendidikan juga dapat memberikan ide-ide kreatif pada proses komunikasi, meskipun pendidikan dalam setiap pelaku komunikasi sudah di atas rata rata bukan berarti bahwa komunikasi tersebut dapat mencapai tujuan dengan tepat. menurut Bestor (Annas, 2017:36) pendidikan memberikan manfaat yaitu menyediakan pelatihan cara cara berfikir kreatif pada individu, mempunyai kemampuan untuk menangani dan menerapkan masalah masalah yang rumit, dan menanamkan sikap tanggung jawab, oleh karena itu pendidikan sangat membantu individu dalam komunikasi. untuk memahami factor penyebab komunikasi dalam penanggulangan bencana alam berikut hasil wawancara.

Berikut hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa Kasi Kesos mengenai hal yang timbul disaat proses komunikasi

“sejauh ini factor penghambat itu, persoalan pendidikan rendahnya pendidikan masyarakat sangat memengaruhi proses komunikasi yang dilakukan disaat sosialisasi penanggulangan bencana alam. (Wawancara, A 12 Maret 2016)”

Sebagaimana dari hasil wawancara diatas factor penghambat dari komunikasi adalah pendidikan. Rendahnya angka pendidikan masyarakat mengenai hal ini sangat minim untuk terjadinya pendistorsian komunikasi. Olehnya itu kami dari pemerintah kecamatan akan senantiasa memaksimalkan hal ini sebaik

mungkin.pendidikan dalam tiap individu memang sangat dibutuhkan,terkhusus ketika individu tersebut berada pada proses komunikasi,karena secara parsial kita sudah memahami tak ada proses komunikasi yang maksimal tanpa ditupong kualitas pendidikan.menurut Koesoema(Annas,2017:37)pendidikan memiliki fungsi dalam proses komunikasi.pendidikan merupakan sesuatu yang melebihi inplus atau mengembangkan daya berfikir yang baik,pendidikan memiliki dan memberikan daya skil yang berbeda dengan sebelumnya,serta pendidikan memberikan kesadaran dalam memahami permasalahan yang ada.

Pendidikan dalam proses komunikasi utamanya pada wilayah tertentu sangat perlu dilakukan dan diperhatikan dalam menjalankan proses komunikasi agar tujuannya sangat jelas serta memiliki kontribusi bagi budaya dan lingkungan sekitar.sikap saling mengkoordinir atau menyadarkan dalam proses komunikasi memberikan efek yang maksimal dalam menciprakan kinerja yang positif antara pelaku komunikasi.kurangnya pendidikan telah memperlambat upaya tersebut dalam memberikan dan menjalankan proses komunikasi secara efektif terhadap masyarakat sekitar social maupun wilayah tertentu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas mengenai peran komunikasi dalam penanggulangan bencana alam dikecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan dibawah ini. Pola komunikasi sudah berjalan sejauh ini maksimal akan tetapi, masih ada permasalahan yang ditemukan seperti:

1. Komunikator, sejauh ini prakter komikasi yang digunakan komunikator beluk efektif karena pemerintah kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa masih membatasi diri terhadap masyarakat, begitupun dengan basarda kabupaten gowa yang kurang aktif melakukan sosialisasi
2. Pesan, penyelenggara pemerintahan kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa isi pesan yang disampaikan masih bersifat umum sehingga masyarakat kurang memahami, serta hanya menyampaikan melalui media tidak secara persuasive
3. Media, yang digunakan dalam persolan komunikasi penyelenggaraan bencana alam masih terbatas karena hanya melalui bentuk reklame (papan pemberitahuan) sehingga subtansi pesan tidak terpahami secara kritis.
4. Kondisi komunikan (masyarakat) yang juga menghadirkan jarak terhadap pemerintah serta mengabaikan papan-papan

pemberitahuan mengakibatkan komunikasi tersebut sangat terbatas dipahami dalam melaksanakan pola komunikasi penanggulangan bencana alam tersebut

5. Sejalan ini efek komunikasi belum terlihat secara jelas karena pola komunikasi yang dilakukan masih terlalu kaku sehingga hasil dari komunikasi tersebut masih belum maksimal.

Adapun factor yang mempengaruhi dalam penanggulangan bencana alam kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa adalah.

1. Rendahnya rasio pendidikan masyarakat setempat mengakibatkan minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami isi komunikasi akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan social.
2. Keterbatasannya kerjasama masyarakat dan pemerintah setempat mengakibatkan gagalnya komunikasi panggulan bencana alam, alhasil sejalan ini masyarakat masih banyak ditemukan melakukan penebangan pohon yang berpotensi mengakibatkan bencana alam.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan diatas mengenai peran komunikasi pemerintah dalam penanggulangan bencana alam dikecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa, maka dapat kita menarik saran berikut.

1. Kiranya pemerintah kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa perlu meningkatkan proses komunikasi secara intens terhadap masyarakat setempat.
2. Perlunya kesiapan serius pihak basarnas dalam meningkatkan kualitas respon dan membantu pihak pemerintah kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa dalam melaksanakan komunikasi efektif terhadap masyarakat.
3. Kiranya masyarakat kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa, perlu memiliki kepekaan secara kritis akan perlunya menjaga dan merawat serta memanfaatkan lingkungan secara maksimal guna terhindar dari bencana alam buatan manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa
- Badansarnasional.2012.Tugasdanfungsi.<http://www.basarnas.go.id/index.php/halaman/36/tugas-dan-fungsi>, 27 januari 2015
- Badansarnasional.2015.Badansarnasional.http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_SA_R_Nasional, 27 januari 2015.
- Effendi,Sofian&SingarimbunMasri.1989,*MetodePenelitianSurvai*,LembagaPenelitian,Jakarta:PendidikandanPeneranganEkonomidanSosial(LP3ES)
- Lesmanaindra. 2014. *EfektivitasKelmbaganBadanPenanggulanganBencana Daerah (Bpd)KabupatenKutai Barat DalmPelaksanaanTugasPokok Dan Fungsinya*[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2014/03/02Isi%20Jurnal%20Indra%20\(03-24-14-09-40-59\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2014/03/02Isi%20Jurnal%20Indra%20(03-24-14-09-40-59).pdf), padatanggal 27 januari 2015
- Nawawihadari.2007,*MetodePenelitianBidangSosial*,Pontianak:GadjahMadaUniversityPress
- Nugroho.2011,*Modelmodelkomunikasi*.<http://indrianimachditasari.blogspot.com/2011/12/model-model-komunikasi.html>, 27 januari 2015
- Nurjannah. 2013.*ManajemenBencana*. Bandung: PenerbitAlfabeta
- Parawangi,Anwar.2003.*Tesis,DampakKomunikasiMassaTerhadapPrilakuNarapidana*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Permana, Abdi. 2012. *Pemerintah Daerah*. Tinggimoncong Pada Tanggal 28 Oktober 2012(<http://abdipermana.blogspot.com>) di Akses Pada Tanggal 09 September 2013
- Rafsanjani.2011,*PeranDanFungsiPemerintahan*,(<http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/12/perandanfungsiPemerintahan.html>,diaksesPadaTanggal09 September 2013)
- Sugiyono.2005,*MemahamiPenelitianKualitatif*. Bandung: Alfabeta
- SantosoGempur 2005, *MetodologiPenelitian*, Jakarta: PrestasiPustakaPublisher.
- Sarundajang, S.H. 2011, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Manado: Kata Penerbit

Surya Arya. 2011. *Meningkatkan Komunikasi Pemerintahan*, <http://birokrasi.kompasiana.com/2011/12/04/meningkatkan-komunikasi-pemerintahan-415726.html>, 27 januar

Yusuf,M. 2011. *8 langkah kreatif tata kelola pemerintah dan pemerintah daerah*, Salemba Empat

<http://tatangismail.blogspot.co.id/2013/05/makalah-tanah-longsor.html> di Akses 20 Januari 2015 pukul 17:09

Jurnal

Anshori, M. (2014). Media Komunitas, Kredibilitas dan relasi Sosial: Framing Komunikator dalam Citizen Journalism. *Komunikasi Massa Jurnal*, 7(2), 167.



RIWAYAT HIDUP



M. ILHAM ANUGRAH, Lahir pada tanggal 30 Mei 1990 di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara dari pasangan M. Yusuf Dg Jarre dan Nurjannah Dg Rimang penulis pertama kali memasuki pendidikan formal di SD Impres Pa'bangngiang Kabupaten Gowa pada tahun 1996 dan tamat pada tahun 2002, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2005. Setelah tamat di SMP , penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2010 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.

